

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional tidak lain ialah satu dari sekian cara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4, menyejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Perwujudan kesejahteraan utamanya dicapai melalui rencana pembangunan yang terencana, komprehensif, serta berjangka panjang (Hendri, 2020). Dengan adanya pembangunan yang terencana akan mendukung desa maupun daerah tertinggal lainnya dalam melaksanakan pembangunan kemandirian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Proses pembangunan yang dimaksud yaitu interaksi antara ketentuan-ketentuan tertentu yang saling berhubungan dan saling memberikan pengaruh satu sama lain, dimana selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga bisa menimbulkan struktur dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan publik kepada daerah ialah dengan diberikannya otonomi yang luas melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta publik dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan sistem desentralisasi pada masa otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai kekuasaan dalam meningkatkan pendapatan asli desa tanpa campur tangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa dijelaskan bahwa pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang sebelumnya terbebani oleh program-program pembangunan dari pusat saat ini bisa lebih luang dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri. Dengan adanya pemberian wewenang ini diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan kinerja pembangunan pada masing-masing daerahnya serta timbulnya semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah (Irawati&Martanti 2017).

Sejalan dengan regulasi otonomi desa tersebut, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung juga menerapkan sistem desentralisasi dalam mengurus dan mengelola arah pembangunannya. Pendapatan yang diterima oleh Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Dalam hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa adanya kecenderungan hubungan yang searah antara besar

pendapatan asli desa dan nilai pembangunan desa. Hal tersebut mengindikasikan adanya peranan penting dari pendapatan asli desa terhadap pembangunan desa. Maka dari itu, pendapatan asli desa perlu dikelola lebih baik lagi agar sesuai dengan arah pembangunan ekonomi desa. Pendapatan asli desa diharapkan bisa mendukung terselenggaranya pembangunan ekonomi di Desa Cimekar. Akan tetapi, data historis menunjukkan bahwa besarnya pendapatan asli desa sebagai salah satu komponen pos pendapatan masih tertinggal jauh dari pendapatan transfer. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1

Rekapitulasi Pendapatan Asli Desa Dan Pendapatan Transfer Desa Cimekar

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer
2017	4.500.000	2.522.399.600
2018	4.500.000	2.512.947.700
2019	4.500.000	3.037.862.300
2020	11.589.690	2.923.072.350

Sumber: Kantor Desa Cimekar (2017-2020)

Berdasarkan tabel 1.1, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam rekapitulasi antara pendapatan asli desa dengan pendapatan transfer desa. Secara umum, sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa adalah wujud dari kemandirian desa dalam mengatur keuangan sehingga desa tidak berrgantungan pada transfer dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Dalam membangun dan mengembangkan desa,

Pemerintah Desa terutama Kepala Desa tentunya harus memahami bagaimana tata kelola serta prosedur pemerintahan dengan baik utamanya dalam pengelolaan pendapatan. Baik buruknya suatu pengelolaan bergantung pada tata kelola pemerintah desa itu sendiri, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan mengerti bagaimana mengelola desa dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian awal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti memperoleh beberapa gambaran diantaranya:

1. Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pendapatan transfer.
2. Masih adanya asset desa yang belum dikelola secara optimal.
3. Masih adanya potensi unggulan desa yang belum dikelola secara optimal oleh Pemerintah Desa Cimekar.
4. Minimnya hasil pemanfaatan asset atau kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa oleh Pemerintah Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana penerapan sistem informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana penerapan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa oleh pemerintah Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana penerapan keterlibatan jasa penilai dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa oleh pemerintah Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Pendapatan Asli Desa oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa oleh pemerintah Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan keterlibatan jasa penilai dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa oleh pemerintah Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat beberapa yang dianggap sebagai manfaat baik secara akademis maupun praktis diantaranya:

1. Adanya penelitian ini secara akademis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu.
2. Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan bagi Pemerintah Desa sebagai bahan evaluasi mengenai strategi pengelolaan Pendapatan Asli Desa dalam meningkatkan pembangunan.

F. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun otonomi

daerah pada Desa Cimekar dimana pemerintah desa memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri wilayah otonom.

Berhubungan dengan mengatur dan mengurus sendiri wilayah otonom termasuk dengan masalah pembiayaan, Desa Cimekar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran yang di dalamnya terdapat laporan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dibuat per-tahun anggaran. Laporan keuangan desa ini dibuat untuk pelaporan keuangan dari Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Desa ini maka hal yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dengan menggunakan teori Mardiasmo. Mardiasmo mengungkapkan bahwa sasaran strategis yang harus dicapai desa dalam kebijakan pengelolaan kekayaan desa terdapat 4 kebijakan pengelolaan pendapatan asli desa, antara lain:

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset desa.

Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset desa merupakan proses kegiatan untuk melakukan pencatatan atau pengumpulan data yang lengkap dan akurat mengenai kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting guna menghasilkan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat.

2. Sistem informasi manajemen asset desa.

Sistem informasi manajemen asset desa merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mendukung tercapainya

transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) untuk penyusunan APBD.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan asset desa.

Pemanfaatan aset daerah harus terkendali dan terawasi secara ketat agar tidak terjadi salah urus (*miss management*), kehilangan dan tidak termanfaatkan (*idle*). Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang saling bersinergi dalam rangka menghindari penyimpangan perencanaan maupun penyalahgunaan asset yang dimiliki.

4. Keterlibatan jasa penilai.

Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan kekayaan desa yaitu mendata dan menilai pertambahan kekayaan desa dari tahun ke tahun hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kontroling terhadap setiap perkembangan suatu desa, selain itu jasa penilai juga berfungsi sebagai evaluator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan pendapatan asli desa sementara di sisi lain potensi sumber daya alam maupun manusia cukup melimpah dan potensial untuk dikembangkan begitu juga dengan Desa Cimekar yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan pembangunan dan menjadi desa mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi

pengelolaan Pendapatan Asli Desa Cimekar dalam meningkatkan program pembangunan.

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1**Kerangka Pemikiran**